

SKRIPSI

**PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI**



Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

AGUSTINA BETE IKU

NIM. E1031211059

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

SKRIPSI

PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Agustina Bete Iku

NIM E1031211059

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Agustina Bete Iku

NIM. E1031211059

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP.198805072014041002

Tanggal: 17 April 2025

Dosen Pembimbing Pendamping



Anny Riwayati, S.E., M.Si
NIP.198909132022032009

Tanggal: 15 April 2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI**

Oleh:

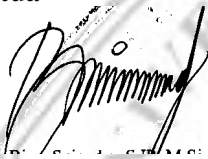
Agustina Bete Iku

NIM. E1031211059

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2025
Waktu : 08.00 - Selesai
Ruang : R.5

Tim Penguji:

Ketua



Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP.198805072014041002

Sekretaris



Anny Riwayati, S.E., M.Si
NIP.198909132022032009

Penguji Utama



Dr. Pardi, S. Sos, M.AB
NIP.197209052002121003

Penguji Pendamping



Dea Varanida, S.I.Kom, M.I.Kom
NIP.199108092019032012

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S. Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskumdag) dalam pemberdayaan UMKM sektor kuliner di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Pemberdayaan UMKM diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya sinergis berbagai pihak untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM agar tangguh dan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis dilakukan menggunakan teori Suprayogi (dalam Suaib 2023;11) yang menyebutkan tiga aspek pemberdayaan: *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *enabling* belum optimal karena belum ada kebijakan daerah khusus pemberdayaan UMKM dan akses pasar masih terbatas. Aspek *empowering* juga kurang maksimal, karena pelatihan hanya bergantung pada kegiatan provinsi akibat keterbatasan anggaran. Pada aspek *protecting*, UMKM masih memiliki kesadaran hukum yang rendah dan menghadapi kendala pembiayaan dalam pengurusan legalitas. Rekomendasi penelitian ini meliputi penyusunan Perda khusus UMKM, peningkatan kemitraan strategis untuk akses pasar, perlindungan hukum, dan permodalan, optimalisasi media sosial untuk promosi, kolaborasi dengan PKK/GOW melalui kompetisi kuliner lokal, kerja sama dengan swasta untuk pelaksanaan bazar UMKM, serta penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan merata di tingkat kecamatan.

Kata Kunci:BPOM, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, HKI, Pemberdayaan, UMKM

ABSTRAC

The purpose of this study is to examine how the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade empowers Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food industry in Nanga Pinoh District, Melawi Regency. According to Law No. 20 of 2008, which regulates MSME empowerment, empowerment is the result of multiple parties working together to build resilient and self-sufficient MSMEs. This study used a descriptive qualitative approach that included documenting, interviewing, and observational methods. Triangulation of sources and methods was used to assess the validity of the data. Suprayogi's theory (in Suaib 2023;11), which highlights three facets of empowerment—enabling, empowering, and protecting—was used to conduct the analysis. Because market access is still restricted and there is no regional policy designed for empowering MSMEs, the research findings demonstrate that the enabling aspect is not optimal. Due to financial limitations, training is solely dependent on provincial initiatives, which makes the empowering component subpar. Lastly, when it comes to protection, MSMEs continue to lack legal knowledge and encounter financial obstacles to achieving legitimacy. Special local regulations for MSMEs should be drafted, strategic partnerships should be expanded for market access, legal protection, and capital, social media should be optimized for promotion, local culinary competitions should be held in conjunction with Family Empowerment Welfare (PKK)/Women's Organisation (GOW), MSME bazaars should be implemented in conjunction with the private sector, and socialization and training should be distributed equally at the sub-district level.

Keywords: BPOM, Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade, Empowerment, MSME.



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *“Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi”*. Pemilihan judul ini didasari oleh keinginan penulis dalam menganalisis peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi mengingat UMKM sendiri memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Dalam proses pemberdayaan UMKM khususnya sektor kuliner di kecamatan Nanga Pinoh masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya program pemberdayaan bagi pengusaha UMKM masih belum terdistribusi secara merata, minimnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya HKI merek produk, dan produk makanan yang belum terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun telah dipasarkan ke masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan upaya dinas dalam memberdayakan UMKM yang ada di kecamatan

Nanga Pinoh dapat terus dioptimalkan sehingga peroduk UMKM daerah mampu bersaing dengan produk-produk yang didatangkan dari luar kota.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data digunakanlah teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian untuk keabsahan data itu sendiri diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian dalam penelitian ini dilandaskan pada teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Suprayogi (2011;181) dalam Suaib (2023, 11) yang menjelaskan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) aspek, diantaranya adalah *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Masing-masing aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pemungkinan atau *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; 2) Pemberdayaan atau *Empowering* yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan 3) Perlindungan atau *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Melawi telah berupaya memberdayakan UMKM melalui tiga aspek utama, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), dan perlindungan (*protecting*). Pada aspek pemungkinan, dinas telah menyediakan fasilitas pasar kuliner, memfasilitasi akses modal melalui kredit, mempermudah perizinan secara *online*, serta memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Namun, dukungan yang

diberikan masih terbatas karena belum adanya regulasi khusus, promosi produk yang masih minim dan pasar yang bersifat lokal, serta belum tersedianya bantuan modal langsung dan jaringan pemasaran yang memadai. Sebagian besar UMKM masih menjalankan usaha secara mandiri dengan modal dan promosi dari usaha sendiri. Pada aspek penguatan, dinas aktif mengadakan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, termasuk pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, legalitas usaha, serta penggunaan dan penerapan sistem pembayaran digital. Meski demikian, keterbatasan anggaran, cakupan program yang belum menyeluruh, rendahnya pemahaman teknologi digital pelaku UMKM, dan kondisi jaringan internet yang belum stabil menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemberdayaan ini. Selain itu, informasi mengenai program pelatihan juga belum tersebar luas sehingga tidak semua pelaku UMKM dapat mengaksesnya. Dalam aspek perlindungan, dinas telah memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan memberikan informasi terkait sertifikasi BPOM. Namun, rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, serta belum optimalnya tindak lanjut dari instansi terkait menyebabkan perlindungan hukum bagi UMKM belum maksimal. Hingga saat ini, belum ada produk UMKM kuliner yang memiliki izin BPOM, dan hanya sebagian kecil yang mengajukan HKI. Secara keseluruhan, meskipun peran dinas dalam pemberdayaan UMKM sudah mencakup ketiga aspek tersebut, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan sinergi antar instansi, serta intensifikasi pendampingan dan penyuluhan agar potensi UMKM di Kabupaten Melawi dapat berkembang secara maksimal.

Adapun saran dalam penelitian ini diantaranya adalah penyusunan Perda khusus UMKM, peningkatan kemitraan strategis untuk akses pasar, perlindungan hukum, dan permodalan, optimalisasi media sosial untuk promosi, kolaborasi dengan PKK/GOW melalui kompetisi kuliner lokal, kerja sama dengan swasta untuk pelaksanaan bazar UMKM, serta penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan merata di tingkat kecamatan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustina Bete Iku

Nomor Mahasiswa : E1031211059

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 19 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Agustina Bete Iku

NIM. E1031211059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati”

(Ulangan 31:8)

“The purpose of Government is to enable the people of nation to live in safety and happiness. Government exists for the interests of the governed, not for the governors”

(Thomas Jefferson)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan dan penopang dalam setiap langkah. Dialah kompas saya dalam menghadapi badai, penghibur di kala lelah, dan kekuatan di saat harapan hampir padam. Segala proses dan pencapaian ini adalah bukti kasih dan penyertaan-Nya yang nyata.
2. Bapak Benediktus Seo (almarhum) dan Ibu Marsunah yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi saya dalam menghadapi setiap rintangan dan tantangan selama proses belajar maupun dalam penyusunan skripsi ini. Bapak dan Ibu selalu menjadi penyemangat utama, memberikan motivasi yang tak pernah padam, dan menanamkan nilai-nilai ketekunan, kejujuran,

serta tanggung jawab yang mendalam dalam diri saya. Meski Bapak telah dipanggil oleh Tuhan, kasih sayang dan segala pelajaran yang beliau berikan senantiasa mengiringi setiap langkah saya. Saya berharap skripsi ini dapat menjadi wujud bakti dan ungkapan terima kasih saya atas segala pengorbanan dan cinta yang telah Bapak dan Ibu curahkan selama ini.

3. Saudara-saudara saya Rudi Hartono Seran (almarhum), Suparjo Rustam Seran, Welly Hadi Nugroho Seran, Edi Hartono Seran, Desi Seran, Oktavianus Seran, dan Depi Hoar Nesi. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan semangat yang selama ini kalian berikan. Dalam setiap langkah perjuangan saya, kalian hadir sebagai penguat dan penyemangat untuk terus maju dan tidak menyerah. Doa, perhatian, dan kebersamaan kalian menjadi bagian penting yang mengiringi perjalanan saya hingga sampai pada titik ini. Khusus kepada Rudi Hartono Seran (almarhum), terima kasih atas kenangan dan inspirasi yang tak terlupakan. Meskipun telah tiada, semangatmu tetap hidup dan menjadi kekuatan tersendiri bagi saya.
4. Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat tiada henti selama saya menempuh proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kehadiran dan doa kalian, saya tidak akan mampu melewati setiap tantangan dengan penuh keyakinan.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama menjalani proses panjang penulisan Skripsi ini. Terkhusus saya

ucapkan kepada teman seperjuangan dalam meraih gelar sarjana Nadia, Dita, Yuni, Angel, Iren, Eli dan Syapri yang bersedia membantu saya mulai dari masa-masa menjadi mahasiswa baru hingga kita menjadi mahasiswa akhir. Tanpa kalian mungkin proses dan perjalanan saya diperantauan akan terasa berat, namun sejauh ini senua terasa ringan karena kehadiran kalian membawa tawa, keceriaan, dan selalu menemani saya dalam suka maupun duka.

6. Diri saya sendiri sebagai hasil perjuangan panjang dan pengorbanan selama masa perkuliahan. Penyusunan skripsi ini bukan hanya memenuhi syarat akademik, tetapi juga perjalanan berharga yang mengajarkan ketekunan, disiplin, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Melalui rintangan dan tekanan, saya belajar untuk tidak menyerah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Skripsi ini menjadi bukti kemampuan dan komitmen saya dalam menuntut ilmu serta tonggak awal perjalanan hidup dan karier saya. Saya berharap karya ini memotivasi saya untuk terus berkembang dan berkontribusi positif di dunia akademik dan masyarakat. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang konsisten dan gigih menjalani setiap proses. Semoga semangat ini selalu terjaga menghadapi tantangan di masa depan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi”. Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan masukan dan saran serta berkenan meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan pada proses penyelesaian Skripsi ini.
3. Anny Riwayati, S.E., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan memberikan masukan dan saran serta berkenan meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan pada proses penyelesaian Skripsi ini.

4. Dr. Pardi, S. Sos, M.AB selaku Penguji Utama dan Dea Varanida, S.I.Kom, M.I.Kom selaku Penguji Pendamping yang telah memberikan banyak masukan guna kesempurnaan dalam penulisan ini.
5. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan dalam urusan perkuliahan.
7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Melawi, Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Melawi, dan pengusaha UMKM sektor Kuliner di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi yang menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Seluruh mahasiswa FISIP Untan angkatan 2021 yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil karya ilmiah yang telah penulis buat dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya.

Pontianak, 19 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agustina Bete Iku' with a stylized flourish at the end.

Agustina Bete Iku
NIM.E1031211059

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
RINGKASAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Fokus Penelitian.....	10
1.4 Rumusan Masalah Penelitian.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1. Peran Pemerintah.....	12
2.2 Pemberdayaan Pemerintah.....	17
2.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.4 Hasil Penelitian yang Relevan.....	22
2.5 Alur Pikir Penelitian.....	25
2.6 Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28

3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3.1 Lokasi Penelitian	31
3.3.2 Waktu Penelitian.....	32
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	33
3.4.1 Subjek Penelitian	33
3.4.2 Objek Penelitian	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5.1 Wawancara	34
3.5.2 Observasi.....	35
3.5.3 Dokumentasi.....	35
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data	36
3.7 Analisis Data	36
3.7.1 Keabsahan Data	36
BAB IV	42
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Nanga Pinoh	42
4.1.1 Keadaan Geografis.....	42
4.1.2 Keadaan Demografis.....	43
4.2 Gambaran Umum UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Nanga Pinoh.....	49
4.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Melawi	51
4.3.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Melawi	51
4.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas	52
4.3.3 Susunan Organisasi Dinas	54
BAB V.....	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Aspek <i>Enabling</i>	60
5.2 Aspek <i>Empowering</i>	71
5.3 Aspek <i>Protecting</i>	83
BAB VI	93

PENUTUP	95
6.1 Kesimpulan	95
6.2 Implikasi	97
6.2.1 Implikasi Teoritis	98
6.2.2 Implikasi Praktis	98
6.3 Saran	99
6.4 Keterbatasan Penelitian	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Melawi Per. 31 Desember 2023	6
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Per 31 Desember 2023	7
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan	23
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	32
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Nanga Pinoh Tahun 2023	43
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kecamatan Nanga Pinoh	44
Tabel 4. 3 Distribusi Jumlah Lulusan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (SD hingga S3) di Kecamatan Nanga Pinoh dalam Rentang Tahun 2019-2025	45
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dua Mata Pencarian yang Paling Dominan di Tiap Desa di Kecamatan Nanga Pinoh Tahun 2024.....	47
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi	50
Tabel 5. 1 Nama dan UMKM yang Diusulkan Oleh Diskumdag Kabupaten Melawi ke Provinsi dalam Pembuatan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Dokumentasi Pelatihan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	73
Gambar 5. 2 Promosi Melalui Sosial Media Milik UMKM Pribadi	81
Gambar 5. 3 Produk Kue Kering dan Kue Lapis yang di Produksi Oleh Toko Kue Nani.....	89
Gambar 5. 4 Produk Cemilan Kita: Kembang Goyang Milik Bu Eva	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara	105
Lampiran 1.2 Daftar Observasi	110
Lampiran 1.3 Dokumentasi Penelitian.....	111
Lampiran 1.4 Daftar Informan	114
Lampiran 1.5 Daftar Riwayat Hidup	115
Lampiran 1.6 Surat Tugas	117

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama setiap negara, mulai dari tingkat lokal hingga pada tingkat desa sekalipun. Ini mencerminkan tekad untuk mendorong perkembangan yang tidak hanya fokus pada pencapaian angka ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di berbagai daerah. Dengan pendekatan yang tepat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat membuka peluang kerja yang lebih besar, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan masa depan yang lebih stabil bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 281,6 juta jiwa per Juni 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia 2024a). Jumlah penduduk ini memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pemanfaatan tenaga kerja yang besar dan pasar domestik yang luas.

Tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,91% atau setara dengan 7,47 juta jiwa pada Agustus 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia 2024b). Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara

pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga menjadi tantangan bagi upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif.

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia sangat bergantung pada peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal ayat 1 sampai 3 UMKM memiliki pengertian masing-masing sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan; Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria dari UMKM itu sendiri diantaranya adalah Usaha Mikro adalah usaha sangat kecil, biasanya dikelola sendiri, dengan aset maksimal Rp50 juta dan

omzet \leq Rp300 juta per tahun. Kemudian Usaha Kecil adalah Usaha yang lebih besar dari mikro, tetapi masih dalam skala terbatas, dengan aset hingga Rp500 juta dan omzet \leq Rp2,5 miliar per tahun. Dan Usaha Menengah adalah Usaha yang lebih mapan dan sistematis, dengan aset hingga Rp10 miliar dan omzet \leq Rp50 miliar per tahun.

Data dari Kementerian Perindustrian, menunjukkan bahwa sektor UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sekitar 60% pada tahun 2023. UMKM mempunyai sektor yang sangat beragam, mulai dari sektor manufaktur, perdagangan, jasa, dan agroindustri (Roudhotun et al. 2024). Persentase yang cukup tinggi tersebut menunjukkan bahwa UMKM mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian negara.

UMKM masih dapat tetap eksis di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, hingga ketidakpastian geopolitik. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah lokal, dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, UMKM juga mendorong inovasi dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. UMKM juga memperkuat kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mendukung kesetaraan sosial dengan memberikan peluang usaha kepada berbagai kelompok masyarakat. Kontribusi UMKM dalam pajak juga penting untuk pendapatan negara, sementara beberapa UMKM mendukung keberlanjutan dengan produk ramah lingkungan.

Melihat peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, maka sudah sepatutnya UMKM mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama pemerintah yang bertanggungjawab terhadap perkembangan UMKM itu sendiri. Dengan adanya keterlibatan dari pemerintah, maka diharapkan UMKM juga bisa mendapatkan akses sumber daya untuk mengembangkan usahanya, sehingga dengan begitu UMKM mampu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan meningkatkan daya saing di pasar. Dengan begitu UMKM yang lebih kompetitif dan berkembang, tidak hanya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, keberpihakan dan dukungan pemerintah terhadap UMKM akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemberdayaan UMKM sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Dimana dalam Pasal 1 (8) dijabarkan bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dan di Pasal 1 (9) juga dijelaskan bahwa Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Adapun tujuan dari pemberdayaan tersebut juga tertuang dalam Pasal 5 yang diantaranya adalah: a.) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b.) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c.) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, digunakan untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut dengan lebih menekankan pada kemudahan akses, perlindungan hukum, dan pemberdayaan UMKM. PP ini memberikan kebijakan yang menyederhanakan perizinan usaha, mempermudah akses pembiayaan, dan melindungi UMKM dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, PP ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, akses terhadap teknologi, serta penguatan kelembagaan, termasuk koperasi, yang seringkali menjadi bagian dari ekosistem UMKM. Pemberdayaan UMKM sendiri diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 2 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah. (2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan; dan b. pemberian fasilitas.

Kecamatan Nanga Pinoh, yang terletak di Kabupaten Melawi, merupakan daerah hasil pemekaran yang saat ini tengah mengalami proses perkembangan. Di wilayah ini, banyak masyarakat yang mengandalkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. UMKM di Kecamatan Nanga Pinoh berkembang pesat, dengan mayoritas pelaku usaha berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan masyarakat umum.

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Melawi Per. 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Usaha Mikro	6.179
2.	Usaha Kecil	115
3.	Usaha Menengah	6
		6.300

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Melawi, 2024.

Dari data yang tertera di atas maka dapat diketahui bahwa UMKM Kabupaten Melawi mencapai angka 6.300 per 31 Desember 2023. Angka ini menunjukkan jumlah yang cukup besar bagi sektor UMKM di daerah tersebut. Hal ini juga mencerminkan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi Per 31 Desember 2023

No.	Jenis Usaha	Lokasi	Jumlah
1.	Usaha Mikro	Kec.Nanga Pinoh	492
2.	Usaha Kecil	Kec. Nanga Pinoh	90
3	Usaha Menengah	Kec. Nanga Pinoh	4
Jumlah			586

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Melawi, 2024

Kecamatan Nanga Pinoh sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Melawi juga memiliki angka UMKM yang cukup tinggi dimana jumlah UMKM tersebut mampu mencapai angka 586. Sebagian besar pelaku UMKM yang ada di kecamatan Nanga Pinoh adalah pelaku UMKM berbasis kuliner atau olahan makanan. Diantaranya seperti rumah makan, produksi kue rumahan, catering, keripik, kerupuk basah, bakso gerobak, angkringan dan sebagainya. Mayoritas UMKM berbasis kuliner ini dikerjakan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) sebagai upaya untuk mencari tambahan bagi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Meskipun pelaku UMKM semakin bertambah seiring berjalannya waktu, tak jarang ada juga UMKM yang terpaksa harus menghentikan kegiatan berjualannya.

Beberapa hal masih menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing UMKM. Salah satunya adalah program pemberdayaan bagi pelaku UMKM yang belum terdistribusi secara merata. Ketimpangan ini terlihat dari masih adanya pelaku UMKM yang belum merasakan manfaat program pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Berdasarkan wawancara awal (*pra-survey*) yang dilakukan bersama salah satu pelaku UMKM yakni Ibu (E) diketahui bahwa beliau belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan dari dinas

baik dari pelatihan dan pembinaan dan sebagainya, dimana dalam menjalankan usahanya, ibu (E) bergerak sendiri tanpa menerima akses dari Diskumdag. Selain itu, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya HKI merek produk UMKM juga masih minim, hal ini diketahui melalui wawancara awal (*pra-survey*) yang dilakukan bersama Ibu Siska selaku staff Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Melawi dimana beliau menyampaikan bahwa respon pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) masih kurang, hal tersebut diduga karena pelaku UMKM belum menyadari pentingnya pendaftaran HKI. Dan yang terakhir yakni terkait dengan produk makanan yang belum terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ditemukan bahwa masih ada sejumlah produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meskipun belum mengantongi sertifikasi tersebut, produk-produk ini sudah beredar dan dijual di salah satu supermarket yang cukup banyak pengunjungnya di Kecamatan Nanga Pinoh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam aspek legalitas dan keamanan produk, yang seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat BPOM memiliki peran penting dalam menjamin bahwa produk pangan dan obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat telah melalui proses pengujian dan memenuhi standar kesehatan.

Mengingat potensi UMKM yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat, maka perlu adanya perbaikan dan penanganan terkait masalah atau fenomena yang menghambat pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Melawi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Melawi dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Diskumdag mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang koperasi, UKM dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Diskumdag memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan judul: **”Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah terkait fenomena yang dijelaskan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan bagi pengusaha UMKM yang masih belum terdistribusi secara merata
2. Minimnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek produk
3. Produk makanan yang belum memiliki label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1.3 Fokus Penelitian

Adapun pembatasan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini yaitu mengacu pada tingkat urgensi/penting dari masalah yang ada dalam penelitian. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada:

Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM khususnya sektor kuliner/makanan dalam pelatihan dan pembinaan guna mengoptimalkan daya saing UMKM, meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya HKI merek produk serta pendaftaran produk makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pemberdayaan UMKM di tingkat daerah dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Melawi dan daerah lain dalam merumuskan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan.